

Dinamika Kuasa Adat, Kekerabatan, dan Kemunduran Budaya, Studi Kritis atas Transformasi Sosial di Nagari Peninggalan Kerajaan Pagaruyun

Al Hafiz Rasya Ramadhan

Mahasiswa Sarjana

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya
Palembang, Indonesia

alhafizrasyaramadhan@gmail.com

Retno Susanti

Dosen Pengampu

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya
Palembang, Indonesia

retno_susanti@fkip.unsri.ac.id

Hudaidah

Dosen Pengampu

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya
Palembang, Indonesia

hudaidah@fkip.unsri.ac.id

Received: ...; Revised: ...; Accepted: ...

Abstract

The Kingdom of Pagaruyun was one of the most important centers of culture and government in Sumatra in the past, especially for the Minangkabau people. This article discusses descriptively the role of the Pagaruyun Kingdom in shaping the social structure, government system, and the development of customary and religious values in the Minangkabau environment. Using a qualitative approach through a literature study, this article explores how the Rajo Tigo Selo collective government system was implemented, as well as how customary law and matrilineal structure played a role in maintaining social harmony. In addition, the integration of adat and Islam is the main force that makes Pagaruyun a center of cultural value stability that has been preserved to this day. Despite the kingdom's political decline due to colonialism and internal conflict, its influence remains strong in the lives of Minang people today, making it a living symbol of cultural heritage. This article aims to strengthen the understanding of Pagaruyun's importance in Minangkabau history and identity as a whole.

Keywords: *Customary Authority, Cultural Decline, Social Transformation*

Abstrak

Kerajaan Pagaruyun merupakan salah satu pusat kebudayaan dan pemerintahan terpenting di wilayah Sumatra pada masa lampau, khususnya bagi masyarakat Minangkabau. Artikel ini membahas secara deskriptif tentang peran Kerajaan Pagaruyun dalam membentuk struktur sosial, sistem pemerintahan, serta pengembangan nilai-nilai adat dan keagamaan di lingkungan Minangkabau. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, artikel ini menelusuri bagaimana sistem pemerintahan kolektif Rajo Tigo Selo dijalankan, serta bagaimana hukum adat dan struktur matrilineal berperan dalam menjaga harmoni sosial. Selain itu, integrasi antara adat dan Islam menjadi kekuatan

utama yang menjadikan Pagaruyung sebagai pusat stabilitas nilai budaya yang lestari hingga kini. Meskipun secara politik kerajaan ini mengalami kemunduran akibat kolonialisme dan konflik internal, pengaruhnya tetap kuat dalam kehidupan masyarakat Minang masa kini, menjadikannya simbol warisan budaya yang hidup. Artikel ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman akan pentingnya Pagaruyung dalam sejarah dan identitas Minangkabau secara menyeluruh, dengan menekankan bahwa kerajaan ini memiliki peran sentral dalam pembentukan struktur budaya, politik, dan sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau.

Kata Kunci: Kuasa Adat, Kemunduran Budaya, Transformasi Sosial

Copyright © 2024 by Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, *Published by* Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. *This is an open access article under the CC BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).*

1. Pendahuluan

Di tengah bentang alam Sumatra Barat yang kaya akan nilai budaya dan sejarah, berdiri sebuah kerajaan yang memainkan peran sentral dalam perkembangan adat dan sistem pemerintahan masyarakat Minangkabau — Kerajaan Pagaruyung. Sebagai pusat kekuasaan adat Minangkabau, Pagaruyung bukan hanya menjadi simbol kekuasaan politik, tetapi juga penjaga nilai-nilai tradisional yang mengakar kuat di kalangan masyarakatnya. Kerajaan ini dikenal sebagai tempat bersatunya unsur adat, agama, dan kerajaan (rajo), yang kemudian melahirkan sistem pemerintahan khas Minangkabau dengan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai landasan utama. (Yulika, 2017)

Asal usul Pagaruyung kerap dikaitkan dengan mitos dan sejarah yang berpadu erat dalam cerita-cerita rakyat maupun naskah kuno. Kerajaan Pagaruyung, yang didirikan sekitar abad ke-14, berperan sebagai pusat kebudayaan yang signifikan dalam pembentukan identitas etnis Minangkabau. Istana Basa Pagaruyung, sebagai simbol kekuasaan kerajaan, mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat Minangkabau yang kaya akan nilai sejarah dan adat. Penelitian oleh Rahmawati et al. (2024) menekankan pentingnya warisan kerajaan ini dalam konteks historis dan antropologis.

Lebih dari sekadar entitas politik, Kerajaan Pagaruyung merupakan tempat bersemainya tatanan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah — filosofi hidup masyarakat Minangkabau yang memadukan nilai-nilai adat dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, Pagaruyung menjadi cerminan bagaimana sistem sosial tradisional dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan jati diri. Dengan menelusuri jejak sejarah, struktur pemerintahan, serta nilai budaya yang dilestarikan oleh Kerajaan Pagaruyung, kita dapat memahami betapa pentingnya peran kerajaan ini dalam membentuk peradaban Minangkabau. Kajian ini juga menjadi pintu masuk untuk menggali lebih dalam kekayaan budaya Indonesia yang begitu beragam dan berakar kuat pada kearifan local (Sadad, 2023)

Kerajaan ini tidak hanya dikenal sebagai pusat kekuasaan politik pada masa lampau, tetapi juga sebagai poros utama perkembangan adat Minangkabau yang khas. Peran Pagaruyung melampaui fungsi kerajaan biasa; ia menjadi simpul penyatuan antara adat istiadat, nilai-nilai keagamaan, dan struktur pemerintahan tradisional yang unik. (Rismansyah, 2014).

Kerajaan Pagaruyung diyakini berdiri sekitar abad ke-14, berakar dari legenda tambo Minangkabau yang menyebutkan asal-usulnya sebagai kelanjutan dari kekuasaan kerajaan Melayu sebelumnya. Lokasi istananya berada di daerah yang kini dikenal sebagai Batusangkar, Tanah Datar. Di sinilah para raja, atau yang dikenal sebagai Rajo Tigo Selo, menjalankan roda pemerintahan berbasis musyawarah bersama kaum adat, cendekiawan agama, dan tokoh masyarakat. Sistem pemerintahan semacam ini menjadikan Pagaruyung sebagai salah satu kerajaan paling demokratis pada masanya, sekaligus sebagai model sistem sosial Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan mufakat. (Rohmah & Salabi, 2025).

Fungsi Pagaruyung tidak terbatas pada aspek administratif semata. Kerajaan ini juga menjadi simbol persatuan bagi masyarakat Minangkabau yang tersebar luas di berbagai daerah, bahkan hingga ke luar Sumatra. Lewat nilai-nilai adat yang terus diwariskan lintas generasi, Pagaruyung memainkan peran penting dalam membentuk identitas kolektif orang Minang, baik di dalam maupun di luar ranah Minangkabau. Tidak heran jika peninggalan dan pengaruhnya masih sangat terasa hingga kini, baik dalam struktur sosial masyarakat maupun dalam tradisi budaya yang tetap hidup. (Sahrul, 2015).

Dalam artikel ini, akan dibahas secara mendalam mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Pagaruyung, struktur pemerintahannya, nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi, serta jejak warisannya dalam kehidupan masyarakat modern. Melalui penelusuran ini, terlihat bahwa Kerajaan Pagaruyung merupakan pilar penting dalam peradaban Minangkabau dan salah satu tonggak budaya yang memperkaya khazanah sejarah Indonesia. (Aizid, 2016).

2. Metode

Penulisan artikel ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dengan fokus pada kajian sejarah dan budaya. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku sejarah, jurnal ilmiah, arsip digital, serta dokumen resmi terkait kebudayaan Minangkabau dan Kerajaan Pagaruyung. Selain itu, informasi dari tambo (naskah tradisional Minangkabau) dan studi literatur mengenai sistem adat Minangkabau juga menjadi bahan utama dalam penyusunan narasi.

Arditya (2022) menjelaskan bahwa proses pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi literatur yang kredibel dan memiliki rujukan akademik yang kuat, baik dari peneliti lokal maupun internasional. Analisis kemudian diarahkan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam struktur pemerintahan Kerajaan Pagaruyung, nilai-nilai adat yang dianut, serta warisan budaya yang masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau modern.

Untuk menjaga objektivitas dan kedalaman kajian, artikel ini juga membandingkan beberapa versi sejarah yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi Kerajaan Pagaruyung dalam perkembangan peradaban di Sumatra. Hasil interpretasi disajikan secara naratif dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap menjaga ketepatan informasi berdasarkan sumber yang digunakan, (Prayogi, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Asal-Usul dan Sejarah Berdirinya Kerajaan Pagaruyung

Kerajaan Pagaruyung diperkirakan berdiri pada abad ke-14 dan berkembang di wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Menurut tambo Minangkabau, kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Malayu di Dharmasraya yang mengalami kemunduran. Pagaruyung didirikan oleh Adityawarman, seorang bangsawan dari keturunan campuran Melayu dan Majapahit, yang berhasil membangun struktur kekuasaan baru di dataran tinggi Minangkabau. Ia memegang gelar Maharajadiraja dan merupakan tokoh penting dalam transisi budaya dan politik lokal kala itu. (Rahim, 2021)

Nama "Pagaruyung" sendiri memiliki arti filosofis, yaitu "tempat perlindungan yang kokoh", yang mencerminkan perannya sebagai pusat kestabilan politik dan adat. Meski sejarahnya tidak terlepas dari mitos dan legenda, banyak bukti arkeologis dan catatan kolonial yang memperkuat eksistensi kerajaan ini sebagai pusat kekuasaan yang berpengaruh di Sumatra bagian tengah.

b. Struktur Pemerintahan: Rajo Tigo Selo dan Sistem Musyawarah

Pemerintahan di Kerajaan Pagaruyung tidak bersifat absolut seperti kerajaan-kerajaan feodal pada umumnya. Sebaliknya, sistem pemerintahan dibentuk berdasarkan prinsip kolektif yang dikenal dengan konsep "Rajo Tigo Selo", yaitu tiga pemimpin utama yang terdiri dari:

- A. Rajo Alam (raja yang mengurus urusan pemerintahan dan hubungan luar),
- B. Rajo Adat (pengawal adat dan tradisi lokal),
- C. Rajo Ibadat (pemimpin dalam urusan agama).

Ketiganya bekerja berdampingan dan saling melengkapi, mencerminkan struktur sosial Minangkabau yang egaliter dan berorientasi pada musyawarah. Keputusan penting dalam kerajaan tidak ditentukan oleh satu orang, melainkan melalui proses konsultasi dengan para penghulu adat, ulama, dan tokoh masyarakat lainnya. Sistem ini menjadi cikal bakal dari nilai-nilai demokratis yang dikenal dalam masyarakat Minang hingga saat ini, di mana kepemimpinan bersifat kolektif, dan suara bersama dianggap lebih penting daripada kekuasaan individual. (Hasibuan et al., 2023)

c. Peran Kerajaan dalam Pelestarian Adat dan Budaya Minangkabau

Sebagai pusat adat, Pagaruyung berperan besar dalam pembentukan identitas Minangkabau. Di bawah perlindungan kerajaan, adat istiadat ditata dan diwariskan secara turun-temurun melalui sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditelusuri melalui pihak ibu. Hal ini menjadi ciri khas utama budaya Minang yang membedakannya dari etnis lain di Indonesia. (Igo, 2025).

Di samping itu, Kerajaan Pagaruyung juga memfasilitasi pembelajaran adat melalui lembaga pendidikan tradisional seperti surau, yang tidak hanya menjadi tempat belajar agama Islam, tetapi juga wadah pendidikan karakter dan adat. Di sinilah nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan rasa malu (malu basuo urang) dipupuk sejak dini.

d. Hubungan Pagaruyung dengan Agama Islam

Proses Islamisasi di Minangkabau berlangsung secara bertahap dan tidak serta-merta menggantikan adat. Sebaliknya, kedua unsur ini dipadukan dalam prinsip "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", yang artinya adat bersumber pada syariat, dan syariat bersumber pada Al-Qur'an. Kerajaan Pagaruyung menjadi pelopor dalam membangun integrasi ini.

Rajo Ibadat, salah satu dari Rajo Tigo Selo, bertanggung jawab menjaga agar praktik adat tetap selaras dengan ajaran Islam. Hal ini menjadikan Pagaruyung sebagai kerajaan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga menjadi pelindung perkembangan Islam di wilayah pedalaman Minangkabau. (Arsil et al., 2022)

e. Pengaruh dan Wilayah Kekuasaan

Kahin (2005). Berpendapat bahwa Kerajaan Pagaruyung memiliki pengaruh yang meluas hingga ke daerah-daerah yang kini menjadi bagian dari Sumatra Barat, sebagian Riau, Jambi, dan bahkan hingga ke Negeri Sembilan di Malaysia. Penyebaran budaya Minangkabau ke luar wilayah aslinya didukung oleh sistem merantau, di mana pemuda Minang keluar dari kampung halaman untuk mencari ilmu, pengalaman, atau penghidupan yang lebih baik.

Melalui tradisi ini, nilai-nilai adat Minang yang bersumber dari Pagaruyung menyebar ke berbagai wilayah, menjadikan kerajaan ini tidak hanya sebagai entitas politik, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan transregional. Meskipun pengaruh politiknya meredup pada masa kolonial, warisan nilai dan adatnya tetap lestari hingga sekarang.

f. Kemunduran dan Warisan Budaya

Masa keemasan Pagaruyung mulai meredup pada akhir abad ke-18, ditandai dengan intervensi kekuatan luar seperti Kesultanan Aceh dan kolonial Belanda. Puncaknya terjadi saat Perang Paderi (1803–1837), di mana terjadi konflik antara kaum adat dan kaum ulama. Istana Pagaruyung dibakar pada 1804 dan kerajaan kehilangan sebagian besar kekuatan politiknya.

Thaib et al. (2016) menjelaskan bahwa, semangat dan nilai-nilai yang diwariskan kerajaan tidak musnah. Kini, replika Istana Basa Pagaruyung berdiri di Batusangkar sebagai simbol kebesaran masa lalu. Budaya Minangkabau yang masih hidup, seperti sistem adat, arsitektur rumah gadang, seni pertunjukan, dan tradisi musyawarah, menjadi bukti nyata bahwa pengaruh Pagaruyung tetap mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Minang.

g. Kekuatan Hukum Adat dan Sistem Kekerabatan

Salah satu pencapaian besar Kerajaan Pagaruyung adalah kodifikasi hukum adat Minangkabau dalam bentuk yang dapat diterapkan secara luas di wilayah kekuasaannya. Hukum adat ini tidak tertulis seperti undang-undang modern, melainkan diwariskan secara lisan dan dijalankan melalui konsensus antar-ninik mamak (pemimpin suku). Konsep keadilan dalam adat Pagaruyung berlandaskan pada keseimbangan sosial, bukan hukuman semata. Tujuan utamanya adalah memulihkan harmoni dalam masyarakat. (Endri, 2021).

Sistem kekerabatan matrilineal — di mana garis keturunan, warisan, dan status sosial diwariskan melalui ibu — juga memperkuat posisi perempuan dalam struktur sosial. Perempuan Minang memiliki hak atas harta pusaka tinggi (tanah ulayat), sementara laki-laki bertanggung jawab menjalankan peran sosial dan mencari nafkah melalui perantauan. Kerajaan Pagaruyung mendukung sistem ini sebagai bagian tak terpisahkan dari tatanan sosial.

h. Simbolisme dalam Arsitektur dan Seni Budaya

Selain struktur pemerintahan dan adat, kerajaan juga berperan penting dalam pengembangan seni dan arsitektur khas Minangkabau. Istana Basa Pagaruyung, sebagai simbol utama kerajaan, dibangun dengan arsitektur rumah gadang yang megah dan sarat makna filosofis. Setiap lengkung atapnya yang menyerupai tanduk kerbau mencerminkan kebesaran, kekuatan, dan strategi — terinspirasi dari legenda kemenangan Minangkabau atas Jawa lewat adu kerbau.

Kerajaan ini juga menjadi pusat seni pertunjukan seperti randai, saluang, dan tari piring yang berfungsi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sarana menyampaikan pesan moral dan adat. Seni ukir dan anyaman yang berkembang di wilayah kerajaan menunjukkan tingginya nilai estetika dan keterampilan masyarakat Minang yang didukung oleh kekuasaan pusat. (Raharja & Puspitawati, 2024)

i. Peran Pagaruyung dalam Diplomasi dan Perdagangan

Ulhaq (2020). Menegaskan bahwa Sebagai kerajaan yang memiliki posisi strategis di jalur perlintasan pedalaman Sumatra, Pagaruyung juga terlibat dalam jaringan perdagangan yang menghubungkan pantai barat dan timur Sumatra. Komoditas seperti emas, lada, dan hasil pertanian menjadi andalan kerajaan. Bahkan, pengaruh Pagaruyung diakui oleh pedagang dari Aceh, Jambi, hingga Malaka.

Namun, pada era kolonial, hubungan ini mulai terganggu akibat intervensi politik Belanda yang memanfaatkan konflik internal, terutama saat Perang Padrielanda menjadikan perpecahan antara kaum adat dan kaum Padri sebagai pintu masuk untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan mereka atas wilayah Minangkabau. (Roza, 2018).

j. Relevansi Kerajaan Pagaruyung dalam Konteks Modern

Meskipun tidak lagi berfungsi sebagai institusi politik, warisan Kerajaan Pagaruyung tetap hidup dan relevan hingga saat ini. Filosofi hidup orang Minang yang menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, dan rasa tanggung jawab kolektif masih menjadi dasar pengambilan keputusan di berbagai lini kehidupan, baik dalam keluarga, nagari (desa adat), maupun dalam organisasi sosial dan politik. (Putri & Yuniseffendri, 2025).

Banyak perantau Minang yang berhasil di berbagai bidang tetap menjunjung nilai-nilai adat Pagaruyung, seperti prinsip “*dima bumi dipijak, disinan langik dijunjung*” (dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung). Nilai ini menunjukkan fleksibilitas budaya Minangkabau dalam beradaptasi dengan lingkungan baru tanpa kehilangan akar tradisinya.



Kerajaan Pagaruyung

4. Simpulan

Kerajaan Pagaruyung merupakan salah satu pusat peradaban penting di Nusantara yang memainkan peran besar dalam membentuk identitas budaya Minangkabau. Berdiri pada abad ke-14, kerajaan ini tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan politik di wilayah pedalaman Sumatra, tetapi juga sebagai tempat bertemunya tiga unsur utama dalam kehidupan masyarakat Minang: adat, agama, dan pemerintahan. Melalui sistem kepemimpinan kolektif yang dikenal sebagai *Rajo Tigo Selo*, Pagaruyung menerapkan model pemerintahan yang harmonis dan demokratis untuk zamannya, mengedepankan musyawarah sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Selain sebagai kekuatan politik, Pagaruyung juga menjadi penjaga nilai-nilai adat Minangkabau, termasuk sistem kekerabatan matrilineal, hukum adat, serta integrasi adat dengan ajaran Islam. Warisan intelektual dan budayanya diwujudkan dalam bentuk arsitektur, kesenian, sistem sosial, hingga filosofi hidup yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Minang, baik yang tinggal di ranah maupun di rantau.

Meskipun secara fisik kerajaan ini mengalami kemunduran dan kehancuran pada masa kolonial, terutama akibat konflik internal dan campur tangan Belanda, pengaruhnya tidak serta-merta hilang. Justru, semangat dan nilai-nilai yang diwariskan Kerajaan Pagaruyung tetap hidup dalam praktik adat, pandangan hidup, dan kesadaran kolektif masyarakat Minangkabau hingga hari ini. Dengan demikian, Pagaruyung bukan hanya bagian dari catatan sejarah masa lalu, tetapi juga menjadi simbol kebudayaan yang terus membentuk karakter dan jati diri masyarakat Minangkabau di tengah arus perubahan zaman.

Daftar Pustaka

- Aizid, U. R. (2016). Sejarah Islam Nusantara: Dari analisis historis hingga arkeologis tentang penyebaran Islam di Nusantara. Diva Press.
- Arditya, P. (2022). Telaah konseptual pendekatan kuantitatif dalam sejarah. *Kalpataru Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 8(1), 76-85.
- Arsil, F., Novrizal, M., Wasti, R. M., Abiyoso, Y., & Abdillah, A. (2022). Praktik Demokrasi Modern Dalam Pemerintahan Nagari Di Minangkabau. *Arena Hukum*, 15, 610-29.
- Endri, Y. (2021). Bunga Rampai Seminar Nasional Hukum Adat Dan Islam Minangkabau (Seri 2).
- Hasibuan, N. A., Sudarman, S., & Hakim, L. (2023). Perkembangan Urbanisasi Kota Padang Tempo Dulu. *JAWI*, 6(2), 110-122.
- Igo, F. (2025). Distorsi Nilai-Nilai Pendidikan Dan Perubahan Fungsi Surau Di Minangkabau (Studi Kasus: Surau Gadang Syekh Burhanuddin, Korong Tanjung Medan, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).
- Kahin, A. R. (2005). Dari pemberontakan ke integrasi Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998. Yayasan Obor Indonesia.
- Prayogi, A. (2021). Paradigma positivisme dan idealisme dalam ilmu sejarah: Tinjauan reflektif terhadap posisi sejarah sebagai ilmu. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 21(1), 75-90.
- Putri, A. O., & Yuniseffendri, Y. (2025). Penggunaan eponim pada papan nama jalan kota surabaya jawa timur: kajian lanskap linguistik. *bapala*, 12(1), 74-83.

- Raharja, F. S., & Puspitawati, P. (2024). Dinamika organisasi majelis adat budaya melayu indonesia (mabmi) dalam melestarikan budaya melayu di kota medan. *humanis: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 16(1), 20-28.
- Rahim, A. (2021). Kerajaan Minangkabau Sebagai Asal-usul Kesultanan Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 399-412.
- Rismansyah, N. (2014). Perancangan pusat seni tradisi Sunda di Ciamis Jawa Barat: Tema reinterpreting tradition (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Rohmah, N., Pd, M., & Salabi, A. S. (2025). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakad Media Publishing.
- Roza, Y. M. (2018). *Konflik dan akomodasi antara adat dan agama di Minangkabau* (Skripsi, UIN Jakarta). Repository UIN Jakarta.
- Sadad, A. (2023). Kerajaan Tulang Bawang, Rangkaian Sejarah yang Hilang. Iphedia Network.
- Sahrul, N. (2015). Estetika Struktur dan Estetika Tekstur Pertunjukan Teater Wayang Padang Karya Wisran Hadi. Disertasi Doktor Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
- Thaib, P. R. R., Jamrah, A., Arda, F., Nurmatias, N., & Undri, U. (2016). Perjuangan Sultan Alam Bagagar Syah dalam melawan penjajah Belanda di Minangkabau pada abad ke-19. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.
- Ulhaq, Z. (2020). Modul pembelajaran SMA sejarah kelas XI: kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Islam.
- Yulika, D. F., & Hum, M. (2017). Epistemologi minangkabau: Makna pengetahuan dalam filsafat adat Minangkabau. ISI Padangpanjang.